

PENGUMUMAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Jakarta, 27 Nopember 2017

BIDANG : EKSEKUTIF**LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN****I. DATA PRIBADI**

1. Nama : drg.WIDYAWATI, M.K.M.
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN - KERJASAMA KESEHATAN
BILATERAL - BIRO KERJASAMA LUAR NEGERI -
SEKRETARIAT JENDERAL
3. NHK : 216010
4. Tanggal Pelaporan : 11 Februari 2015, 22 Maret 2016

Status Laporan

11 Februari 2015	22 Maret 2016
------------------	---------------

II. DATA HARTA**A. HARTA TIDAK BERGERAK
(TANAH & BANGUNAN)**

Rp.	0	Rp.	0
-----	---	-----	---

B. HARTA BERGERAK**a. ALAT TRANSPORTASI
DAN MESIN LAINNYA**

Rp.	10.000.000	Rp.	10.000.000
-----	------------	-----	------------

1. Motor, merk HONDA VARIO, tahun pembuatan 2007, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2007

Rp.	10.000.000	Rp.	10.000.000
-----	------------	-----	------------

**b. PETERNAKAN,
PERIKANAN,
PERKEBUNAN,
PERTANIAN, KEHUTANAN,
PERTAMBANGAN DAN
USAHA LAINNYA**

----	----
------	------

	11 Februari 2015	22 Maret 2016
c. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp. 41.000.000	Rp. 41.000.000
1. LOGAM MULIA, yang berasal dari HASIL SENDIRI, WARISAN DAN HIBAH, perolehan dari tahun 1988 sampai dengan 2003	Rp. 16.500.000	Rp. 16.500.000
2. BENDA BERGERAK LAINNYA, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2013	Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000
3. BENDA BERGERAK LAINNYA, yang berasal dari HASIL SENDIRI DAN HIBAH, perolehan dari tahun 1984 sampai dengan 2012	Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000
4. BENDA BERGERAK LAINNYA, yang berasal dari HASIL SENDIRI, WARISAN DAN HIBAH, perolehan dari tahun 1981 sampai dengan 2012	Rp. 17.000.000	Rp. 17.000.000
C. SURAT BERHARGA	Rp. 0	Rp. 0
D. GIRO DAN SETARA KAS LAINNYA	Rp. 20.774.509	Rp. 37.127.649
1. Yang berasal dari HASIL SENDIRI (Perubahan atas data yang dilaporkan sebelumnya)	Rp. 20.774.509	Rp. 37.127.649
E. PIUTANG	Rp. 0	Rp. 0
TOTAL HARTA (II)	Rp. 71.774.509	Rp. 88.127.649
III. HUTANG	----	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II - III)	Rp. 71.774.509	Rp. 88.127.649

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam pengumuman ini sesuai dengan yang dilaporkan oleh Penyelenggara Negara dan tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis

